



Mengatasi Permasalahan dalam Penyaluran Bansos Berdasarkan Unsur-Unsur Komunikasinya

Sopian¹, R Hiru Muhammad², Asep Rahman Umbara^{3*}, Mirza Shahreza⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Indonesia

Email: sopian@umj.ac.id, hiru.muhammad@umj.ac.id

Abstrak

Program bantuan sosial (bansos) seringkali menghadapi banyak masalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai penyebab masalah dan alternatif solusinya, terutama dikaitkan dengan tinjauan unsur-unsur komunikasi yang menyertai implementasi program. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan studi literatur. Data dianalisis untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan implementasi program bansos pada dasarnya karena buruknya integrasi dan integritas data, lemahnya sistem pengawasan, adanya korupsi, dan intervensi kepentingan politik. Dalam tinjauan unsur komunikasi permasalahan tersebut termasuk kedalam unsur lingkungan (dari birokrasi, data, dan sistem yang juga bermasalah). Permasalahan pada unsur ini langsung/tidak langsung memicu masalah pada unsur komunikasi lain; komunikator pelayanan bansos, pesan-pesannya, saluran komunikasi, komunikasi, hingga efeknya. Berdasarkan permasalahan setiap unsur tersebut, masing-masing solusinya: digitalisasi prosedur, sinkronisasi data *real-time*, transparansi, penegakan hukum; meningkatkan integritas, etika, pemahaman data pada komunikator pelayanan di lapangan; informasi harus jelas, terbuka, persuasif, edukatif mengenai hak serta prosedur bantuan; integrasi kanal digital (aplikasi/medsos) dan personal untuk akses informasi dan pengaduan; mendorong masyarakat proaktif dan menindak tegas penyalahgunaan bantuan; mengupayakan efek positif pada diri komunikasi penerima bansos. Hasil penelitian merekomendasikan model strategi komunikasi efektif terkait penyaluran bansos dengan memperhatikan setiap unsur komunikasinya.

Kata Kunci: Masalah Bansos, Komunikasi Terkait Bansos, Unsur Komunikasi, Strategi Komunikasi Bansos.

Abstract

Social assistance programs often face problems. The purpose of this study is to identify causes of these problems and solutions, primarily related to communication elements that accompany program implementation. This qualitative descriptive research uses a literature review. Data are analyzed to answer the objectives. The results showed that problems in the social assistance program are essentially due to poor data integration and integrity, weak oversight systems, corruption, and political intervention. In the communication element, these problems are included in the environmental element (from bureaucracy, data, and systems that are also problematic). The problems in this element trigger problems in other communication components, which are: the communicators, messages, channels, receivers, and effects. Its each solution: digitalization procedures, real-time data synchronization, transparency, law enforcement; improving integrity, ethics, and data understanding of service communicators in the field; information must be clear, open, persuasive, and educational regarding rights and assistance procedures; integration of digital channels and personal channels; encourage a proactive public and take firm action against laws; strive for a positive impact on social assistance recipients. The research recommends a communication strategy model for social assistance distribution, taking into account each element of communication.

Keywords: Social Assistance Problems, Communication Related To Social Assistance, Elements of Communication, Social Assistance Communication Strategies.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos) sering terjadi. Pengertian bansos menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bansos di Lingkungan Kemensos, pada Pasal 1 ayat 1 yaitu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja bansos bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dalam mengimplementasikannya pasti menyertakan proses komunikasi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang menyertainya.

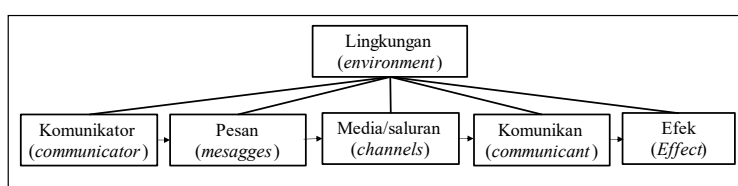
Masalah terkait implementasi program bansos terutama ketidakmerataan penyaluran, lambannya pendistribusian, pungutan liar, penyelewengan dana, pemotongan jumlah nominal dan sumber daya yang diterima, bahkan terjadinya politisasi bansos (Noerkaisar, 2021). Selain itu masalah verifikasi data dan penerima bansos tidak termasuk kategori tidak sejahtera (Joharsoyo, 2024). Menurut data dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Sekda Pemkab Tegal, 2023), dari awal 2021 hingga awal 2023, negara mengalami kerugian hingga Rp. 523 miliar per bulan akibat permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima bansos.

Permasalahan implementasi program bansos tidak bisa dibebankan pada satu kementerian, melainkan perlu melibatkan pihak lain. Meskipun demikian Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) termasuk yang memegang otoritas dalam penyusunan dan implementasi regulasi di sektor kesejahteraan masyarakat termasuk bansos, pihaknya menunjukkan sinergi institusi lain dan dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, serta unsur masyarakat lokal dalam mewujudkan efektivitas program ini.

Komunikasi memegang peranan krusial dalam efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat (Salsabila et al., 2024). Dalam konteks komunikasi pembangunan seperti halnya komunikasi pada program bansos, komunikasi bukan sekadar alat diseminasi informasi, melainkan penggerak perubahan sosial dan partisipasi masyarakat. Menurut Quebral seperti dikutip Nasution (2002), komunikasi pembangunan adalah komunikasi untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara, dalam hal ini termasuk pada implementasi program bansos.

Permasalahan penyaluran bansos perlu diatasi, salah satunya melibatkan studi ilmu komunikasi. Pendekatan ini relevan karena pelaksanaan bansos di lapangan sangat bergantung pada aktivitas komunikasi yang efektif (Ali & Leonardi, 2022; Cangara, 2011; Purnia et al., 2019; Puspitasari et al., 2022; Salsabila et al., 2024); Sosial, 2015; Masannang et al., 2023). Berbagai literatur menyebutkan, unsur dalam komunikasi setidaknya; komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Ada unsur lingkungan yang tidak terlepas dari suatu peristiwa komunikasi. Seiler & Beall (2011) menempatkan lingkungan sebagai unsur pertama sekaligus turut menentukan unsur-unsur lainnya.

1. Lingkungan (*environment*) atau konteks menurut De Vito (dalam Hariyanto (2021)) antara lain terdiri dari dimensi fisik, sosial-psikologis, waktu. Konteks situasional termasuk ke dalam unsur lingkungan seperti historis, norma sosiokultural, dan kejadian/peristiwa kontemporer (Sumirat & Suryana, 2017). Lingkungan merupakan unsur pertama dalam komunikasi karena komunikasi tidak terjadi di ruang hampa. Komunikasi selalu berada dalam lingkungan yang mempengaruhi unsur lainnya (Seiler & Beall, 2011).
2. Komunikator (*communicator*) adalah individu, orang atau pihak (institusi, lembaga, kelompok) yang memproduksi dan atau menyampaikan berbagai pesan.
3. Pesan (*mesagges*) adalah isi pernyataan yang disampaikan komunikator. Bentuk pesan dapat berupa verbal (bahasa lisan dan bahasa tulisan) dan nonverbal (gerak tubuh, gambar, warna, dan lain-lain). Isi pesan dapat dikemas sedemikian rupa sesuai tujuan dari penyampaian pesannya.
4. Media/saluran (*channels*) yaitu penghantar pesan sehingga pesan sampai/diterima/diakses oleh sasaran penerima pesan.
5. Komunikan (*communicant*) yaitu sasaran atau penerima pesan.
6. Efek (*effect*) yaitu dampak yang terjadi/muncul pada diri komunikan.



Gambar 1. Keterkaitan unsur-unsur dalam komunikasi

Unsur-unsur komunikasi dalam kegiatan penyaluran bansos merupakan satu kesatuan. Keberhasilan, kegagalan atau permasalahan dalam penyaluran bansos sangat terkait unsur-unsur komunikasi tersebut (Ali & Leonardi, 2023; Anisti et al., 2022; Nurhidayah & Sutarjo, 2023; Putong & Wahyudi, 2022; Sembiring et al., 2020; Suprpto, 2015; Winarta, 2020).

Penelitian terkait komunikasi berkenaan penyaluran bansos telah dilakukan (Damanik et al., 2022; Jayus et al., 2022; Masannang et al., 2023; Pratiwi, 2023). Meskipun demikian, tidak satu pun penelitian terdahulu yang memfokuskan pada kriteria tertentu pada setiap unsur komunikasi secara lebih komprehensif. Begitu pula penelitian lain yang secara tidak langsung berkenaan dengan komunikasi penyaluran bansos (Ainayah & Dewi, 2022; Ali & Leonardi, 2022; Alfredo et al., 2022; Gemiharto & Juningsih, 2021; Junanda et al., 2020; Prasmita & Utama, 2020; Pratama et al., 2022; Purnia et al., 2019; Putri et al., 2021; Rizti et al. 2025; Suprpto et al. 2024; Triyono & Kartika, 2022). Penelitian mereka diantaranya menekankan penggunaan aplikasi online (Purnia et al 2019), kebijakan bansos (Gemiharto & Juningsih 2021), niat baik bansos (Ali & Leonardi 2022), penyaluran bansos (Jayus et al 2022), pelaksanaan PKH (Indriani & Fadhlain 2022), penggunaan medianya (Damanik et al 2022), pemanfaatan aplikasi (Nurhidayah & Sutarjo 2023), program lanjut usia terlantar (Pratiwi & Laksana 2023), penjadwalan pertemuan kelompok (Masannang et al 2023), penggunaan suatu metode dalam distribusi bansos (Suprpto et al 2024), metode turun lapangan dalam bansos (Rizti et al 2025), efektivitas dan pengaruh bansos (Prasmita & Utama, 2020), sistem informasi bansos (Junanda et al., 2020), sistem informasi pencegahan korupsi bansos (Alfredo et al., 2022), evaluasi pelaksanaan program bansos (Putri et al., 2021), sosialisasi penyaluran bansos (Pratama et al., 2022), dan strategi optimalisasi bansos (Triyono & Kartika, 2022).

Perhatian utama semua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada upaya mengatasi permasalahan penyaluran bansos berdasarkan pendekatan unsur-unsur komunikasinya. Pendekatan komprehensif pada unsur-unsur komunikasi ini penting dilakukan karena peristiwa komunikasi yang menyertai penyaluran bansos merupakan komunikasi berdimensi proses atau sistem sehingga masing-masing unsurnya satu sama lain saling terkait dan tidak terpisahkan (Cangara, 2011). Dengan demikian, pendekatan parsial pada unsur komunikasi tertentu tidak bisa memecahkan masalah penyaluran bansos selama ini. Apalagi upaya mengatasi permasalahan melalui pendekatan unsur-unsur komunikasi pada dasarnya mengarah pada mewujudkan efektivitas komunikasi (Hardjana, 2000), termasuk yang menyertai program bansos. Berdasarkan celah kekosongan penelitian dan banyaknya permasalahan yang dimaksud, penelitian ini dilakukan. Rumusan masalahnya; 1) Bagaimana permasalahan dalam implementasi program bansos dan alternatif solusinya? 2) Bagaimana permasalahan penyaluran bansos berdasarkan unsur-unsur komunikasi dan solusinya? 3) Bagaimana strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif?

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan studi literatur (Hadi, 2000). Studi literatur ditempuh dengan membaca dan menganalisis sumber data yang relevan sesuai keperluan penelitian (Arikunto, 2010). Data bersumber dari berbagai artikel yang diperoleh melalui mesin pencari Google Scholar, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), dan juga Google untuk menemukan laporan/data lain yang relevan dari website resmi dan portal berita *online*. Kata-kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan data dari mesin pencarian tersebut yaitu “penyaluran bansos”, “masalah bansos”, “permasalahan penyaluran bansos”, “komunikasi dalam penyaluran bansos”. Data yang terkumpul direduksi dengan memilih, mengelompokkan, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan konteks penelitian. Kriteria lain, data tersebut dirilis dalam rentang waktu selama lima tahun terakhir (2020-2025). Hasil reduksi data disajikan lalu diverifikasi dan disimpulkan sesuai data pendukung (Sugiyono, 2018). Data yang disajikan menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis. Setelah itu melakukan verifikasi terhadap data yang didukung data lain sebelum akhirnya ditarik sebuah kesimpulan akhir.

Upaya untuk menentukan solusi atas permasalahan yang dianalisis, penelitian ini menggunakan *Root Cause Analysis* (Analisis Akar Penyebab). Menurut Andersen & Fagerhaug (2006), *Root Cause Analysis* adalah penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan tindakan untuk mengatasinya sesuai konteks masalahnya itu. Peneliti menggunakan pendekatan unsur-unsur komunikasi Seiler & Beall (2011) yang menempatkan unsur lingkungan sebagai unsur pertama proses komunikasi. Berdasarkan pemahaman analisis akar penyebab masalah, peneliti mengidentifikasi penyebab masalah dari proses penyaluran bansos berdasarkan unsur-unsur komunikasinya, terutama diawali dari mengidentifikasi unsur lingkungan, yang kemudian mengidentifikasi tindakan atau cara untuk mengatasinya sesuai konteks masalahnya itu. Penulis kemudian menyertakan konsep strategi komunikasi menurut Midleton (Cangara, 2013) dalam menghasilkan suatu model strategi komunikasi yang dianggap efektif dalam penyaluran program bansos.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam Implementasi Program Bansos dan Alternatif Solusinya

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber data yang dihimpun (2020-2025) dapat disimpulkan bahwa beragam permasalahan terkait implementasi program bansos meliputi seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi permasalahan dalam implementasi program bansos dan sumber kutipan

No	Identifikasi Permasalahan	Sumber Kutipan
1	Proses seleksi/pendaftaran calon penerima bansos yang dianggap/potensial tidak transparan	(Hutasoit et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Suprpto; et al., 2024).
2	Data calon penerima bansos yang tidak akurat, tumpang tindih dan atau tidak diperbarui	(Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Novrizaldi, 2021; Oley,2020; Rachman, 2023; Republika, 2021; Rizti et al., 2025; Rosanti et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Sembiring et al., 2020)
3	Data distribusi penerima bansos dan pendistribusiannya yang tidak transparan, tidak tepat sasaran dan atau bermasala	(Ariansyah et al., 2025; Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023) http://dpr.go.id , 2023; (Junanda et al., 2020) Latif & Pangestu, 2022; Oley,2020; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Rachman, 2023; Rizti et al., 2025; Sembiring et al., 2020; Suprpto; et al., 2024; Wahyuni, 2021; Wicaksono et al 2022).
4	Kurang/tidak optimalnya saluran komunikasi/akses informasi yang tersedia	(Ariansyah et al., 2025; Republika, 2021; Tafanao & Ratnawati, 2025; Wicaksono et al 2022).
5	Ketidakjelasan dalam berbagai informasi lain terkait dengan bansos yang perlu diketahui warga	(Ariansyah et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Rizti et al., 2025; Wicaksono et al 2022).
6	Politisasi bansos terutama untuk kepentingan politik praktis	(Abidin et al., 2025; Halim, 2021; Noerkaisar, 2021; Salsabila et al., 2024; Syahadat et al., 2024; Wibowo, 2024)
7	Lemahnya koordinasi antar berbagai pihak/institusi yang berwenang dan kurangnya pengawasan/kontrol	(Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Wahyuni, 2021).
8	Potensi praktik korupsi, kolusi, dan atau nepotisme (KKN) yang mewarnai implementasi program bansos dan masih lemahnya penegakan hukum/bagi pihak yang melanggar hukum	(Alfedo et al., 2022; Betresia et al., 2021; Latif & Pangestu, 2022; http://dpr.go.id , 2023; Junanda et al., 2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024).
9	Penerima bansos orang yang tidak berhak, penerima bansos melakukan pelanggaran tertentu, calon penerima bansos tidak proaktif untuk mendapatkan haknya.	(Humas, 2023; Rachman, 2023; Rizti et al., 2025; Ruhjana & Ferdiansyah, 2020; Sembiring et al., 2020; Simorangkir, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi permasalahan sebagaimana tertera pada Tabel 1, berbagai permasalahan terkait implementasi program bansos pada dasarnya menyangkut buruknya integrasi dan atau transparansi data (terutama merujuk data nomor 1, 2, 3, 5, 9), lemahnya sistem pengawasan (terutama data nomor 1 sampai 9), serta adanya intervensi kepentingan politik dan praktik korupsi (terutama nomor 1,8). Permasalahan paling sering/banyak terjadi yaitu: data yang tidak akurat dan tidak transparan (29,0%), praktik KKN dengan beragam modusnya (22,6%); distribusi bansos tidak tepat sasaran (16,1%); masalah komunikasi dan akses informasi (12,9%); proses seleksi yang rumit dan alur pendaftaran yang memakan waktu (9,7%); lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga (pusat dan daerah) (3,2%); masalah pada diri individu warga/penerima bansos (6,5%). Beberapa solusi untuk mengatasinya secara umum: pembenahan tata kelola dan transparansi informasi termasuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif (Nasution et al., 2022); perbaikan prosedur dan koordinasi, termasuk pemutakhiran data penerima bansos secara rutin (Ariansyah et al., 2025); penguatan SDM dan pemberdayaan ekonomi warga yang tergolong kurang/tidak mampu, termasuk melalui pengembangan UMKM (Ariansyah et al., 2025); dan pengawasan dan penegakan hukum yang adil bagi setiap pelaku terkait program penyaluran bansos (Ariansyah et al., 2025).

Permasalahan Penyaluran Bansos Berdasarkan Unsur Komunikasi dan Solusinya

Permasalahan pada Unsur Lingkungan dan Alternatif Solusinya

Permasalahan program bansos, dalam tinjauan unsur komunikasi termasuk sebagai unsur lingkungan (Sumirat & Suryana, 2017) yang menyertai implementasi program. Unsur lingkungan yang dimaksud: proses seleksi/pendaftaran calon penerima bansos yang masih tidak transparan; adanya data calon penerima bansos yang tidak akurat, tumpang tindih dan atau tidak diperbarui; data distribusi penerima bansos dan pendistribusiannya masih ada yang tidak transparan, tidak tepat sasaran atau bermasalah; kurang/tidak optimalnya saluran komunikasi/akses informasi yang tersedia; kurang/ketidakjelasan dalam berbagai informasi lain terkait dengan bansos yang perlu diketahui warga; masih adanya warga/calon penerima bansos yang kurang/tidak proaktif dan melakukan pelanggaran tertentu; lemahnya koordinasi antar berbagai pihak/institusi yang berwenang dan kurangnya pengawasan/kontrol; potensi praktik KKN dan intervensi politik praktis dan masih lemahnya penegakan hukum/bagi yang melanggar aturan.

Semua unsur lingkungan ini, dalam kajian komunikasi mencakup unsur lingkungan fisik dan teknis, lingkungan sosio-politik, organisasional, psikologis dan perilaku (Sumirat & Suryana, 2017). Lingkungan fisik dan teknisnya terutama infrastruktur data mengalami masalah (Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Novrizaldi, 2021; Oley, 2020; Rachman, 2023; Republika, 2021; Rizti et al., 2025; Rosanti et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Sembiring et al., 2020) sehingga terjadi distorsi informasi antara data di atas kertas dengan realitas kemiskinan di lapangan. Lingkungan sosio-politiknya disusupi kepentingan politik dan perilaku koruptif (Abidin et al., 2025; Alfredo et al., 2022; Betresia et al., 2021; Halim, 2021; <http://dpr.go.id>, 2023; Junanda et al., 2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Noerkaisar, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024) sehingga merusak kredibilitas pelaku komunikasi di level tertentu dan pesan-pesannya. Lingkungan organisasionalnya terkait lemahnya koordinasi antar-institusi dan kurangnya pengawasan (Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Wahyuni, 2021) sehingga menimbulkan ketidakjelasan informasi dan potensi penyimpangan lain. Lingkungan psikologis dan perilaku termasuk yang ditunjukkan sebagian warga adalah respons dari ketertutupan akses informasi atau informasi yang tidak transparan (Ariansyah et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Rizti et al., 2025; Wicaksono et al 2022). Dalam tinjauan lingkungan komunikasi, perilaku ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem dalam menciptakan lingkungan informasi yang inklusif dan jelas.

Alternatif solusi terkait beragam masalah tersebut diantaranya; mendorong masyarakat miskin untuk proaktif dalam mengajukan diri sebagai penerima bansos (Ruhayana & Ferdiansyah, 2020), perlunya proses seleksi yang terbuka tutup dan secara digital (Suprpto; et al., 2024), penyederhanaan alur pendaftaran yang dinilai rumit dan berbelar-larut (Ombudsman.go.id, 2024; Republika, 2021), transparansi kriteria kelayakan calon penerima bansos dan dipahami warga (Putri et al., 2021), dan pentingnya penegakan hukum bagi yang melanggar (Simorangkir, 2025). Selain itu juga perlunya sinkronisasi data termasuk secara *real-time* (Sembiring et al., 2020) yang melibatkan Disdukcapil (Novrizaldi, 2021). Pemerintah daerah (pemda) juga harus melakukan pemutakhiran data secara berkala (Dwiarto, 2023), menyediakan dukungan anggarannya (Dwiarto, 2023; Republika, 2021), serta menggunakan sistem pendukung keputusan otomatis untuk menghindari kesalahan input manual oleh petugas (Suprpto; et al ., 2024).

Guna menghindari penyaluran bansos kepada pihak yang tidak berhak (seperti PNS, Kepala Desa, atau warga yang sudah sejahtera) (Ombudsman.go.id, 2024), perlu diterapkan mekanisme pelabelan rumah penerima bantuan sebagai bentuk kontrol sosial (Ruhayana & Ferdiansyah, 2020). Pengarsipan data penyaluran dari tingkat kecamatan hingga masyarakat harus diperbaiki agar jejak distribusi dapat ditelusuri secara jelas (Junanda et al., 2020). Diperlukan salah satunya perancangan Sistem Informasi Bansos Tracer (Si BANTER) sebagai alat bagi masyarakat untuk melacak dan memperoleh informasi terkini mengenai proses penyaluran bansos (Wicaksono et al 2022).

Terkait minimnya akses informasi jadwal dan tata cara penyaluran bansos (Wicaksono et al 2022) dapat diatasi dengan: sosialisasi masif melalui berbagai media yang mudah dijangkau masyarakat hingga wilayah 3T (Republika, 2021); perbaikan teknis pada aplikasi layanan (seperti aplikasi Cek Bansos) agar proses registrasi dan login tidak menyulitkan pengguna (Tafanao & Ratnawat, 2025); dan optimalisasi dan publikasi unit pengelolaan pengaduan Kemensos agar masyarakat tahu ke mana harus melapor jika terjadi kendala (Putri et al., 2021; Republika, 2021).

Lemahnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa harus diperbaiki melalui penguatan koordinasi lintas sektor (Wahyuni, 2021). Pengawasan ketat diperlukan untuk menutup celah manipulasi oleh pihak ketiga atau oknum birokrasi di berbagai level (Wahyuni, 2021). Mekanisme pemantauan yang

ketat harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari penetapan alokasi dana hingga bantuan diterima oleh warga (Ariansyah et al., 2025; Latif & Pangestu, 2022; Wahyuni, 2021).

Perihal penegakan hukum dan pencegahan KKN terkait bansos, perlu solusi yang mendesak bagi semua aktor yang terlibat tanpa pandang bulu (Alfredo et al., 2022; Ariansyah et al., 2025; Septo, 2025). Selain itu pemisahan tegas antara bantuan sosial dengan kepentingan politik praktis guna mencegah diskriminasi dalam penyaluran (Salsabila et al., 2024), serta penguatan etika profesi bagi petugas lapangan dan aparat penegak hukum (Betresia et al., 2021; Latif & Pangestu, 2022).

Uraian mengenai berbagai alternatif solusi diatas pada dasarnya diarahkan diarahkan untuk mewujudkan unsur lingkungan dari birokrasi, budaya kerja, dan atau manajemen yang berorientasi pada; transformasi digital dan prosedur, akurasi dan sinkronisasi data, transparansi dan kontrol sosial, dan pengawasan dan penegakan hukum yang secara rinci akan diuraikan pada pembahasan “mempersiapkan unsur lingkungan”. Permasalahan pada unsur lingkungan tersebut merupakan unsur utama yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi unsur-unsur komunikasi lain (Seiler & Beall, 2011); komunikator, pesan, media, komunikan, dan efeknya. Itulah sebabnya permasalahan pada unsur lingkungan harus segera diatasi sebelum unsur-unsur lainnya. Hal ini dapat dipahami karena unsur lingkungan lebih menyentuh pada aspek permasalahan sistem, birokrasi, manajemen, dan atau penyalahgunaan kewenangan yang dijalankan oleh pihak-pihak di level yang lebih tinggi. Semua itu berpengaruh pada tataran implementasi penyaluran bansos hingga ke level bawah sehingga pengawasan sekaligus penegakan hukum harus dilakukan (Alfredo et al., 2022; Ariansyah et al., 2025; Betresia et al., 2021; <http://dpr.go.id>, 2023; Junanda et al., 2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024; Wahyuni, 2021).

Permasalahan pada Unsur Komunikator dan Alternatif Solusinya

Komunikator pelayanan bansos yang berinteraksi langsung dengan warga melibatkan berbagai pihak dari level atau lembaga yang berbeda bahkan diantaranya warga yang mungkin tidak mewakili lembaga apapun. Secara umum mereka adalah: staf/pejabat desa dan atau kelurahan yang mengurus administrasi warga (Purnia et al. 2019); petugas lapangan yang menerima dokumen pengajuan (SKTM, KTP, KK) untuk program PKH/BPNT; petugas yang melakukan pengecekan kebenaran data calon penerima di lapangan; staf/petugas dari PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara (terkait distribusi BLT); atas nama kelompok/organisasi dari masyarakat bawah yang membantu penyaluran produk bansos; warga perorangan yang membantu proses penyaluran di lingkungan secara sukarela (Purnia et al., 2019).

Permasalahan pada unsur komunikator pelayanan bansos turut ditentukan unsur lingkungannya (Seiler & Beall, 2011). Hal ini langsung atau tidak langsung berdampak potensi ketidaktahuan, kekurangpahaman dan ketidakterbukaan informasi yang ditunjukkan komunikator pelayanan seperti teridentifikasi dari sebagian hasil analisis data pada Tabel 1 (Hutasoit et al., 2025; Ombudsman.go.id, 2024; Putong & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021; Suprpto; et al., 2024).

Sesuai permasalahannya itu maka solusi yang dapat dilakukan; pertama, terlebih dahulu menyelesaikan masalah pada unsur-unsur lingkungannya, kedua, para komunikator tersebut dibekali/membekali dengan pengetahuan/keterampilan, yang sesuai konteks masalahnya yaitu; pemahaman proses pendaftaran calon penerima bansos secara benar; data calon penerima bansos yang akurat/diperbarui; data distribusi bansos dan jadwalnya; pengetahuan saluran komunikasi/akses informasi yang tersedia dan cara menggunakannya; pengetahuan potensi adanya warga/calon penerima bansos yang kurang/tidak proaktif serta melakukan pelanggaran dan cara menyikapinya; pentingnya koordinasi dengan pihak tertentu sesuai tugasnya; pengetahuan potensi terjadinya praktik KKN di lapangan dan cara menyikapinya secara tepat; pentingnya etika dan integritas dalam melaksanakan tugas.

Tidak setiap komunikator harus dibekali/membekali diri dengan semua itu, tetapi menyesuaikan dengan kewenangan atau perannya sebagaimana telah dijelaskan. *Update* pengetahuan dan atau keterampilan tambahan mungkin perlu dimiliki oleh para komunikator pelayanan tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Permasalahan pada Unsur Pesan dan Alternatif Solusinya

Beragam masalah pada unsur lingkungan dan komunikator tadi, langsung tidak langsung, berpotensi memunculkan permasalahan pada unsur pesan-pesan yang disampaikan komunikator pelayanan seperti informasi kurang jelas, tidak transparan, tidak lengkap dan yang lain. Hal ini teridentifikasi dari sebagian analisis data pada Tabel 1 (Ali & Leonardi, 2022; Dwiarto, 2023; Fikrillah et al., 2023; Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Novrizaldi, 2021; Oley, 2020; Rachman, 2023; Republika, 2021; Rizti et al., 2025; Rosanti et al., 2022; Salsabila et al., 2024; Sembiring et al., 2020). Dengan demikian,

berdasarkan permasalahannya itu maka solusinya agar pesan-pesan yang disampaikan merujuk pada pengetahuan, data, dan atau dokumen penunjang, setidaknya terkait; prosedur pendaftaran bansos yang benar; sosialisasi, edukasi dan atau persuasi secara optimal mengenai perlunya peran aktif masyarakat miskin untuk mengajukan diri sebagai penerima bansos; mekanisme distribusi bansos termasuk di wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal); data calon penerima bansos yang akurat; informasi jadwal pendistribusiannya secara terbuka; keberadaan saluran komunikasi dan akses informasi yang tersedia dan cara mengaksesnya; hak dan atau tindakan yang harus dan tidak boleh ditunjukkan; pentingnya etika, integritas dan ketaatan terhadap aturan; mewaspadaikan potensi penipuan dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap calon penerima bansos (Hukum, 2025).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya bagaimana pesan-pesan disampaikan secara tepat. Pesan-pesan yang disampaikan terkait program bansos dapat/harus berupa; sosialisasi dan atau penyampaian informasi secara terbuka (keterbukaan informasi), mengedukasi, dan mempersuasi (Gusrienti, 2025; Salsabila et al., 2024; Wirmanda et al., 2019).

Tidak setiap pesan-pesan/informasi tersebut harus disampaikan/dimiliki setiap komunikator pelayanan di lapangan, tetapi menyesuaikan dengan kewenangan, tugas, atau peran masing-masing dan situasi yang dihadapi saat berinteraksi dengan warga. Namun, sosialisasi bansos yang baik dan transparan harus terus dilakukan (Ali & Leonardi (2023; Putong & Wahyudi 2022). Keakuratan informasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi juga termasuk penting karena sangat mendukung keberhasilan dan keefektifan suatu program (Mustafa et al., 2020) termasuk bansos. Dengan demikian, berbagai *noises* (gangguan) pun harus diatasi atau dihindari.

Secara lebih spesifik, *noise* dipahami sebagai segala sesuatu yang mendistorsi dan atau mengaburkan pesan/informasi (Devito 2018) karena berpotensi menyebabkan permasalahan tertentu dalam penyaluran bansos. Di antara contoh *noise* lainnya yaitu memanfaatkan salah pengertian antara pengertian standar kemiskinan menurut pemerintah dengan persepsi subjektif masyarakat atau perangkat desa (Kemensos 2021), munculnya maladministrasi dalam penyaluran bansos (Ombudsman, 2020), terjadinya korupsi karena ketidakjelasan informasi mengenai bansos (Dewi. et al 2025) dan memanfaatkan kebingungan masyarakat mengenai kriteria penerima bansos (Yuntho 2011). Berbagai *noises* ini dapat diatasi, termasuk melalui sosialisasi yang terbuka, komprehensif, transparan, dan atau terbukanya akses komunikasi dua arah antara pihak warga penerima bansos dengan penyedia/penyelenggara/pelayanan bansos.

Permasalahan pada Unsur Media/Saluran Komunikasi dan Alternatif Solusinya

Permasalahan pada unsur lingkungan dan pesan, serta hasil analisis terhadap sebagian data dari Tabel 1 mengungkap permasalahan terkait dengan media atau saluran komunikasi dalam implementasi program bansos di lapangan. Hal ini ditandai adanya pesan yang diterima warga calon penerima bansos yang kurang dipahami, kurang lengkap, atau kurang jelas, dan atau tidak bisa diakses. Misalnya sulitnya penggunaan aplikasi karena menyangkut teknis tertentu, kurang memadainya informasi yang disajikan di akun-akun media sosial dan situs resmi yang disediakan.

Penyediaan berbagai aplikasi yang optimal, akun-akun media sosial, website resmi seperti telah disinggung tidak serta merta dapat sepenuhnya mengatasi semua permasalahan ini (Junanda et al., 2020; Tafanao & Ratnawat, 2025; Wicaksono et al 2022). Namun demikian keberadaannya tetap bermanfaat jika dapat berfungsi dengan baik dan digunakan secara optimal. Begitu pula penyediaan *hotline* atau *Command Center* 021-171, misalnya, yang beroperasi 24 jam sehingga usul dan sanggah penerima bansos bisa dilakukan langsung tanpa harus menunggu kedatangan petugas pendataan (Trianto, 2025).

Saluran komunikasi secara *face to face* dan atau *interpersonal communication* antara komunikator pelayanan bansos dengan warga juga harus menjadi perhatian. Sebut saja diantaranya aplikasi *WhatsApp*, catatan tangan, atau brosur dalam situasi/konteks tertentu mungkin diperlukan. Tujuannya memperjelas informasi sehingga berbagai pesan mengenai program bansos dapat dipahami lebih lebih baik, lebih lengkap, dan atau lebih jelas. Prinsipnya integrasi beragam saluran komunikasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan manajemen data serta efisiensi komunikasi selama proses penyaluran berlangsung (Gusrienti, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, alternatif solusi atas masalah ini, mengarahkan pada pemahaman pentingnya memastikan dua saluran utama untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan serta kelengkapan informasi. Pertama, saluran mandiri (massal) dengan mengoptimalkan aplikasi khusus, media sosial, dan situs resmi agar warga dapat mengecek status bantuan secara mandiri serta mengajukan usulan atau sanggahan tanpa menunggu petugas. Kedua, saluran personal (tatap muka) yaitu menggunakan *WhatsApp* untuk komunikasi langsung, media cetak untuk panduan yang mudah dibaca, serta catatan manual untuk

memperjelas instruksi teknis di lapangan secara spontan. Keberadaan saluran komunikasi dan akses informasi tersebut bertujuan mempermudah penyampaian informasi dan transparansi. Evaluasi perlu dilakukan terkait keberadaannya saat ini dikaitkan dengan efektivitasnya.

Permasalahan pada Unsur Komunikan dan Alternatif Solusinya

Di antara permasalahan pada komunikan penerima bansos yaitu; menerima bansos padahal tidak berhak, calon penerima bansos tidak proaktif untuk mendapatkan haknya, kurangnya pengetahuan dan atau pemahaman tertentu terkait dengan bansos, penerima bansos melakukan pelanggaran tertentu seperti tampak dari sebagian hasil analisis data pada Tabel 1 (Humas, 2023; Rachman, 2023; Rizti et al., 2025; Ruhyana & Ferdiansyah, 2020; Sembiring et al., 2020; Simorangkir, 2025).

Permasalahan pada komunikan penerima bansos ini harus diatasi oleh berbagai pihak sesuai konteks masalahnya. Bagi komunikator petugas pelayanan bansos, sebisa mungkin harus tetap menunjukkan etika integritas. Dengan demikian mereka bisa tegas dalam menyikapi komunikan penerima bansos yang menyalahi aturan.

Permasalahan pada Unsur Efek dan Alternatif Solusinya

Penyaluran bansos bermasalah menimbulkan dampak seperti: perlakuan tidak adil di antara warga, penyalahgunaan wewenang, perdebatan dalam penetapan penerima, dan merosotnya keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Ariansyah et al., 2025). Dampak tersebut pada akhirnya menimbulkan efek negatif seperti keresahan pada diri warga (Purnia et al., 2019), kecewa (Triyono & Kartika, 2022) hingga marah karena hak-haknya terampas dan atau tidak diberikan secara penuh (Oley, 2020). Modusnya antara lain seperti mengurangi kualitas dan kuantitas produk bansos dan memotong dana bansos langsung tunai (Alfredo et al., 2022). Berdasarkan uraian ini disimpulkan bahwa permasalahan efek yang terjadi pada warga penerima bansos meliputi: kecewa, marah, merasa tidak diperlakukan adil, krisis kepercayaan pada kinerja dan integritas pemerintah.

Agar efek negatif tersebut tidak lagi menimpa warga penerima bansos, maka semua pejabat, individu, atau pihak yang terlibat dalam implementasi program bansos, baik di internal maupun di eksternal institusi/organisasi dan dari lintas institusi/level, begitu pula dari kalangan masyarakat bawah, harus bersama-sama menunjukkan etika, integritas sekaligus komitmen dalam menyukseskan program ini.

Strategi Komunikasi dalam Penyaluran Bansos yang Efektif

Uraian hasil penelitian di atas mengarah pada pemahaman bahwa setiap unsur komunikasi terkait penyaluran bansos harus memiliki kualifikasi/memenuhi sesuatu yang seharusnya. Hal ini diawali dengan memastikan bahwa unsur lingkungan harus menjadi perhatian pertama (Seiler & Beall, 2011) dan memastikan agar unsur ini sesuai dengan yang seharusnya (tidak bermasalah). Selanjutnya, memfokuskan perhatian pada unsur-unsur komunikasi lain.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan kriterita atau sesuatu yang hendaknya dipenuhi oleh unsur komunikasi yaitu kredibilitas bagi unsur komunikator (Hasmawati, 2020), unsur pesan dan unsur saluran/media komunikasinya sesuai kebutuhan/sasaran komunikan (Julianto & Agnanditiya, 2021). Media/saluran komunikasi juga berkesesuaian dengan konteks ini pesan (Harahap et al., 2021), memahami sasaran komunikan (Wijaya, 2015), dan efeknya untuk menghasilkan perubahan (Nurhadi & Kurniawan, 2017).

Proses komunikasi berjalan efektif jika semua unsur komunikasi memenuhi persyaratan tertentu (Nurhadi & Kurniawan 2017). Hal ini sejalan dengan Hardjana (2000), komunikasi efektif merupakan komunikasi yang memperhatikan unsur-unsur komunikasinya. Permasalahan pada satu unsur komunikasi berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi. Semua ini sejalan pula dengan strategi komunikasi yang dikemukakan Middleton (Cangara, 2013) perihal pentingnya mempersiapkan sebaik mungkin unsur-unsur dalam komunikasi. Dengan demikian, strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif, sesuai konteks penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Mempersiapkan Unsur Lingkungan

Mewujudkan lingkungan bagi implementasi program penyaluran bansos yang positif dan kondusif menuntut pelibatan berbagai pihak/institusi di semua level dan lintas organisasi, baik secara internal maupun eksternal sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan uraian di awal, unsur lingkungan yang dimaksud yaitu birokrasi, budaya kerja, dan atau manajemen yang berorientasi pada :

a) Transformasi digital dan prosedur, meliputi:

- 1) Digitalisasi terintegrasi, yaitu menyederhanakan alur pendaftaran yang rumit menjadi sistem digital yang terpadu untuk menghilangkan kesan seleksi manual/tertutup.
- 2) Sistem pendukung keputusan, yaitu menggunakan sistem otomatis untuk meminimalisir kesalahan input manusia (*human error*).
- 3) Aplikasi pelacakan, yaitu pengembangan suatu sistem tertentu agar masyarakat bisa melacak status bantuan secara *real-time*.

b) Akurasi dan sinkronisasi data, meliputi:

- 1) Sinkronisasi *real-time*, yaitu menghubungkan DTKS dengan data kependudukan Disdukcapil untuk menghapus data ganda atau warga yang sudah meninggal.
- 2) Pemutakhiran berkala, yaitu mewajibkan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan secara rutin dengan dukungan anggaran yang memadai.

c) Transparansi dan kontrol sosial, yaitu:

- 1) Publikasi kriteria, yaitu membuka standar kelayakan penerima bansos agar masyarakat memahami siapa yang berhak menerima bantuan.
- 2) Pelabelan rumah, yaitu pemasangan label pada rumah penerima sebagai bentuk kontrol sosial agar bantuan tepat sasaran (tidak diterima oleh warga mampu).
- 3) Optimalisasi aduan, yaitu memperbaiki kanal komunikasi dan unit pengaduan Kemensos hingga ke wilayah pelosok (3T).

d) Pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:

- 1) Sanksi tegas, yaitu mencoret penerima yang menyalahgunakan bantuan (misalnya untuk judi *online*) dan menindak tegas oknum birokrasi yang melakukan manipulasi/KKN.
- 2) Independensi bansos, memisahkan penyaluran bansos dari kepentingan politik praktis untuk mencegah diskriminasi.
- 3) Sinergi lintas sektor, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa dalam pengawasan distribusi.

Unsur lingkungan di atas memungkinkan untuk diperbarui sesuai konteks yang berkembang demi mewujudkan lingkungan yang lebih positif, kondusif, produktif, dan atau lebih terkontrol.

Mempersiapkan Unsur Komunikator

Mempersiapkan unsur komunikator berkenaan dengan apa yang disebut sebagai kredibilitas dan kompetensi komunikator. Kredibilitas juga kompetensi hendaknya dipenuhi oleh unsur komunikator (Hasmawati, 2020).

Kredibilitas dan kompetensi berkenaan dengan integritas dan atau profesionalitas. Merujuk hasil analisis berdasarkan sebagian data dari Tabel 1 dan yang telah diuraikan pada poin pembahasan mengenai “permasalahan pada unsur efek dan alternatif solusinya” di atas, maka mempersiapkan kredibilitas dan kompetensi komunikator pelayanan bansos di lapangan, setidaknya melalui pembekalan dalam hal;

1. Prosedur dan data; pemahaman proses pendaftaran, penyediaan data yang akurat mengenai calon penerima bansos serta jadwal distribusinya.
2. Saluran informasi dan komunikasi; penguasaan saluran informasi resmi dan edukasi terkait kebijakan bansos kepada warga.
3. Mitigasi masalah; penanganan warga yang tidak proaktif dan atau penyelesaian pelanggaran di lapangan.
4. Koordinasi dan integritas; penguatan kerja sama antarpihak dan komitmen menjaga kejujuran dan kepatuhan hukum.
5. Etika & integritas; kewaspadaan terhadap potensi praktik KKN dan cara menyikapinya dengan tepat.

Siapakah yang membekali para komunikator di atas? Insitusi/lembaga, pihak-pihak, atau pimpinan di unit kerja dari masing-masing institusi, lembaga, atau organisasi yang berwenang atau bertanggung jawab di mana para komunikator tersebut bernaung. Seperti telah disampaikan sebelumnya, tidak setiap komunikator yang dimaksud harus dibekali dengan semua itu, melainkan menyesuaikan dengan tugas, kewenangan, atau peran saat berinteraksi dengan warga/calon/penerima bansos. Apalagi sesuai temuan, ada pula komunikator pelayanan bansos dari kalangan masyarakat umum dan atau tidak mewakili langsung dari institusi yang berwenang. Mereka “sekadar” diperbantukan untuk tugas di lapangan (Purnia et al. 2019).

Mempersiapkan Unsur Pesan

Unsur pesan harus dipersiapkan sesuai sasaran atau kebutuhan komunikan (Julianto & Agnanditiya, 2021), dalam hal ini warga atau calon penerima bansos. Sesuai konteks unsur komunikatornya di atas dan sasaran program, secara umum, pesan yang sekiranya perlu dipersiapkan dan disampaikan setidaknya meliputi;

1. Prosedur dan data; pemahaman alur pendaftaran, data penerima yang akurat/terbaru, serta jadwal dan alur distribusi.
2. Saluran komunikasi dan informasi; penguasaan saluran informasi resmi dan pengetahuan umum terkait bansos untuk warga.
3. Mitigasi masalah; kemampuan menghadapi warga yang tidak proaktif, menangani pelanggaran di lapangan, serta mencegah praktik KKN di lapangan yang mungkin terjadi.
4. Etika dan koordinasi; penguatan koordinasi antarpihak serta menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

Selain isi pesan, dalam menyampaikan pesannya pun hendaknya diperhatikan. Setidaknya terdapat empat aspek utama dalam penyampaian pesan yaitu; sosialisasi, edukasi, persuasi, keterbukaan informasi, dan kesesuaian waktunya. Pertama, sosialisasi yaitu memastikan warga yang berhak menerima bansos dapat mengetahuinya (Ali & Leonardi (2023). Kedua, edukasi yaitu agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik (Wirmanda et al., 2019). Ketiga, persuasi berarti memengaruhi perubahan sikap dan perilaku penerima pesan agar selaras dengan tujuan program (Salsabila et al., 2024). Keempat, keterbukaan informasi merupakan prinsip dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas seleksi penerima bansos dan distribusinya. Kelima, ketepatan waktu penyampaiannya juga harus menyertai pesan-pesan yang disampaikan karena menunjang keberhasilan dan keefektifan suatu program (Mustafa et al., 2020) termasuk bansos. Penjelasan ini menegaskan bahwa selain isi pesan, cara, prinsip dan atau kapan/bagaimana pesan disampaikan juga harus diperhatikan.

Mempersiapkan Unsur Media/Saluran Informasi

Mempersiapkan unsur ini harus sesuai kebutuhan/sasaran komunikan (Julianto & Agnanditiya, 2021). Penyediaan saluran komunikasi hendaknya berkesesuaian dengan informasi yang disampaikan (Harahap et al., 2021). Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka media/saluran komunikasi dan atau akses informasi yang dapat dipersiapkan oleh institusi penanggung-jawab program bansos yaitu:

1. Saluran digital dan berbasis teknologi. Optimalisasi saluran komunikasi melalui aplikasi khusus, media sosial, dan website resmi untuk menyajikan informasi bantuan sosial yang lengkap, dan penyediaan sistem layanan mandiri agar warga dapat melacak status penyaluran secara akurat.
2. Saluran respon cepat (*real-time*). Digunakan untuk menangani usulan/sanggahan warga tanpa harus menunggu petugas lapangan.
3. Saluran komunikasi personal dan cetak. Media komunikasi tatap muka dan personal sangat krusial untuk memperjelas informasi teknis di lapangan dari mulai *smarprphone* hingga catatan manual (penjelasan spontan dan tambahan).
4. Manajemen dan literasi saluran. Penyediaan teknologi harus dibarengi dengan aspek manajerial yang kuat, yaitu peningkatan literasi media petugas lapangan dan pembentukan tim pengelola teknis khusus untuk menangani operasional aplikasi serta pembaruan informasi secara terpusat.

Prinsip dari keberadaan media bertujuan mempermudah penyampaian informasi dan transparansi bagi penerima bansos untuk mendapatkan hak-haknya itu. Evaluasi perlu dilakukan terkait keberadaannya.

Mempersiapkan Unsur Komunikan

Masalah utama terkait komunikan penerima bansos mencakup isu salah sasaran (Humas, 2023; Joharsoyo, 2024; Oley, 2020; Rachman, 2023; Sembiring et al., 2020), serta kurangnya sikap kooperatif dan pelanggaran aturan oleh calon penerima (Ruhana & Ferdiansyah, 2020; Simorangkir, 2025). Selain itu, keterbatasan pengetahuan warga mengenai hak-hak mereka juga menjadi kendala signifikan (Anisti et al., 2022).

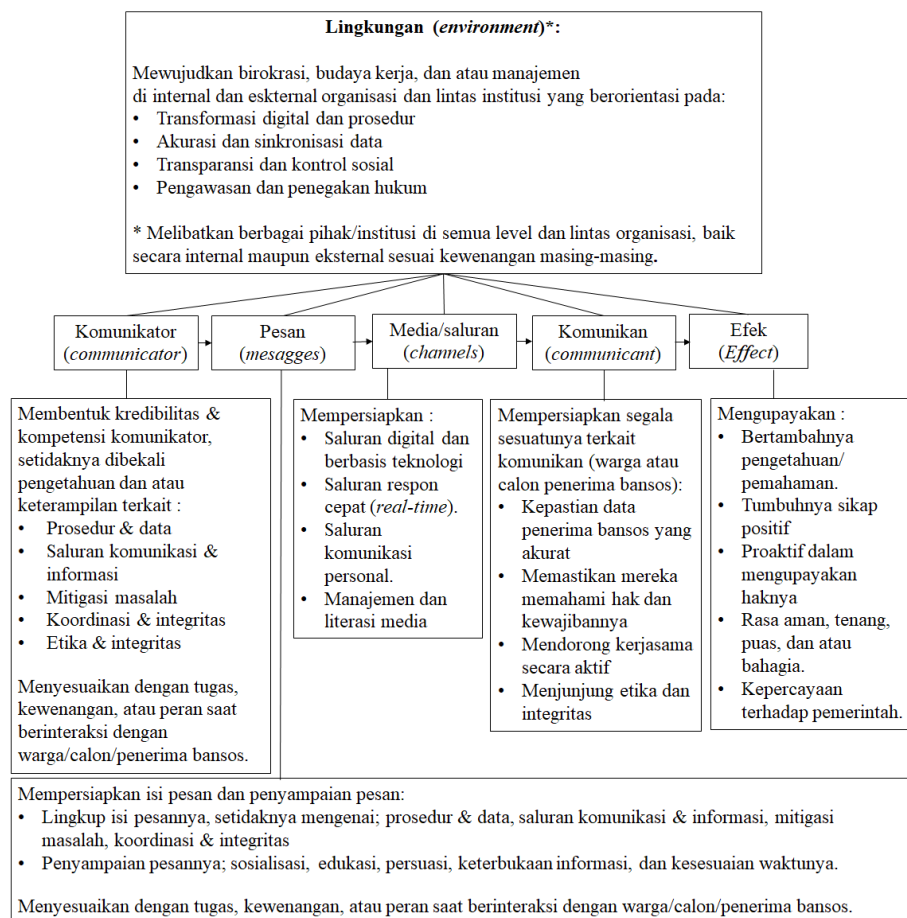
Pemahaman terhadap permasalahan komunikan seperti ini perlu dipahami (Wijaya, 2015) agar dalam proses komunikasi terkait penyaluran bansos bisa lebih efektif. Dengan demikian “mempersiapkan” komunikan penerima bansos harus dilakukan dan berdasarkan konteks masalahnya itu, setidaknya dapat dilakukan dengan; memastikan keakuratan data calon penerima bansos sesuai jenis bansosnya, memastikan mereka memahami hak dan kewajibannya, mendorong kerjasama secara aktif, menjunjung etika dan integritas, mempersiapkan data komunikan (calon penerima bansos) yang sudah dimutakhirkan, melakukan sosialisasi, edukasi, dan persuasi sesuai kebutuhan dan atau hak calon/penerima bansos (komunikan).

Mengupayakan Efek Positif

Efek komunikasi mencakup: kognitif, afektif, dan konatif (Alvonco, 2014). Efek kognitif terkait pengetahuan/pemahaman penerima bansos mengenai hak-haknya. Efek afektif munculnya perasaan atau sikap tertentu pada diri calon/penerima bansos. Efek konatif seperti perilaku pada diri warga atau calon penerima bansos untuk bertindak proaktif dan patuh pada aturan. Adapun efek yang diharapkan terjadi pada diri komunikator penerima bansos; bertambahnya pengetahuan/wawasan/pemahaman, tumbuhnya sikap positif, proaktif dalam mengupayakan haknya, rasa aman, tenang, puas, bahagia, dan atau kepercayaan terhadap pemerintah. Bukan efek negatif seperti kecewa (Triyono & Kartika, 2022) bahkan marah karena hak-hak penerima bansos terampas dan atau tidak diberikan secara penuh (Oley, 2020).

Guna mencegah munculnya efek negatif sekaligus mengupayakan terjadinya efek positif pada diri warga penerima bansos, diperlukan integritas dan komitmen penuh dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam implementasi program bansos. Koordinasi antarberbagai pihak, pengawasan, dan penegakan hukum juga menjadi bagian yang langsung atau tidak langsung sangat penting dalam mengupayakan efek positif pada warga penerima bansos sekaligus (Alfedo et al., 2022; Ariansyah et al., 2025; Betresia et al., 2021; Junanda et al., 2020; Kumalasari, 2024; Latif & Pangestu, 2022; Republika, 2021; Salsabila et al., 2024; Septo, 2025; Syahadat et al., 2024; Wahyuni, 2021).

Hasil penelitian ini merekomendasikan model strategi komunikasi penyaluran bansos yang efektif merujuk kriteria, ketentuan, atau sesuai keharusan/harapan tertentu pada semua unsur komunikasi. Model merupakan sebuah struktur konseptual yang berfungsi memetakan penerapan teori ke dalam situasi spesifik (Liliweri 2011). Menurut Wiseman dan Barker (dalam Ardianto, 2007), terdapat tiga fungsi utama model komunikasi; menggambarkan jalannya proses komunikasi, menyajikan hubungan secara visual, dan menjadi alat mengidentifikasi sekaligus mengatasi potensi hambatan dalam berkomunikasi. Adapun model dari strategi komunikasi efektif terkait penyaluran bansos seperti tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Model strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif

Gambar 2 menjelaskan bagaimana strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang efektif dapat diupayakan dengan terlebih dahulu mewujudkan unsur lingkungan yang berorientasi pada transformasi digital dan prosedur, akurasi dan sinkronisasi data, transparansi dan kontrol sosial, serta pengawasan dan

penegakan hukum, baik di internal organisasi maupun hubungannya dengan pihak-pihak dari eksternal organisasi yang terkait implementasi program bansos. Garis-garis yang menghubungkan unsur lingkungan dengan unsur-unsur komunikasi di bawahnya menjelaskan bahwa unsur lingkungan, langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi unsur-unsur tersebut; komunikatornya, pesannya, saluran/media yang digunakannya, komunikan sasaran penerima bansosnya, dan efeknya.

Unsur lingkungan begitu berpengaruh pada unsur-unsur komunikasi lain. Pengaruh unsur lingkungan pada komunikator dapat mempengaruhi sikap dan atau perilaku mereka (Devito 2019). Kemudian, tanpa pemahaman terhadap konteks lingkungan, pesan pun berisiko kehilangan makna aslinya atau bahkan menimbulkan salah paham (Mulyana 2017). Lingkungan juga berperan dalam menentukan media/saluran komunikasi yang paling relevan (Littlejohn & Foss 2017). Reaksi atau efek yang muncul pada diri komunikan juga turut dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang menyertai (Devito 2018), dalam hal ini lingkungan terkait implementasi penyaluran dan atau program bansos.

Garis-garis vertikal dan horisontal yang menghubungkan setiap unsur komunikasi dengan berbagai hal yang harus menjadi perhatiannya masing-masing, menunjukkan suatu rangkaian dari model strategi komunikasi tersebut. Model strategi komunikasi ini mendeskripsikan perihal segala sesuatu yang hendaknya diperhatikan pada setiap unsur komunikasi dalam mengupayakan komunikasi terkait penyaluran bansos yang efektif.

Seperti halnya fungsi model komunikasi (Wiseman dan Barker dalam Ardianto (2007), model strategi komunikasi dalam penyaluran bansos ini pun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai jalannya suatu proses komunikasi terkait implementasi program distribusi bansos yang efektif. Model ini menyajikan relasi secara visual berbagai konsep, dan diharapkan membantu mengidentifikasi potensi permasalahan dalam berkomunikasi.

Model strategi komunikasi dalam penyaluran bansos yang kami sajikan masih bersifat umum. Model ini dapat diturunkan menjadi model strategi komunikasi pelayanan bansos yang spesifik sesuai jenis bansos. Spesifikasinya dimulai dengan memastikan unsur lingkungan yang seharusnya (tidak bermasalah) dan menentukan siapa/dari institusi/lembaga apa komunikator pelayanannya, apa saja informasinya (pesan-pesannya) dan bagaimana cara menyampaikannya, saluran komunikasi & akses informasi apa yang diperlukan, dan siapa saja (target komunikan) penerima bantuan yang berhak. Belum ada penelitian terdahulu yang merekomendasikan model strategi komunikasi seperti ini meskipun penelitian terkait strategi komunikasi, khususnya terkait program bansos sudah dilakukan (Jayus et al., 2022). Apalagi teori penelitian penelitian tersebut juga tidak tersampaikan secara tegas. Adapun hasil penelitian Damanik et al. (2022) dan Masannang et al. (2023), misalnya, masing-masing mengenai strategi komunikasi yang berfokus pada penggunaan media dan melalui penyuluhan/pertemuan kelompok.

Optimalisasi penggunaan media, termasuk melalui digitalisasi, tidak cukup dalam mengupayakan strategi komunikasi penyaluran bansos yang efektif tanpa memperhatikan unsur-unsur komunikasi lainnya termasuk unsur lingkungan. Peristiwa komunikasi dalam penyaluran bansos, merupakan suatu proses dan sistem (Cangara, 2011) sehingga memperhatikan semua unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terutama ketika berbicara mengenai strategi komunikasi yang efektif (Hardjana, 2000), dalam hal ini terkait penyaluran program bansos.

KESIMPULAN

Permasalahan penyaluran bansos berakar dari birokrasi, data, dan sistem yang juga bermasalah karena mengabaikan prinsip-prinsip etika, integritas, efektivitas, transparansi, dan penegakan hukum. Akar permasalahan tersebut termasuk dalam unsur lingkungan yang langsung atau tidak langsung memicu masalah pada unsur-unsur komunikasi lainnya; komunikator, pesan, media, hingga efek pada masyarakat. Masing-masing solusinya melalui: digitalisasi prosedur, sinkronisasi data *real-time*, transparansi, dan penegakan hukum terhadap KKN; meningkatkan integritas, etika, dan pemahaman data pada petugas pelayanan di lapangan; informasi harus jelas, terbuka, persuasif, dan edukatif mengenai hak serta prosedur bantuan; integrasi kanal digital (aplikasi/medsos) dan personal untuk akses informasi dan pengaduan; mendorong masyarakat proaktif dan menindak tegas penyalahgunaan bantuan; senang, puas, dan atau bahagia serta tumbuhnya kepercayaan publik.

Efektivitas strategi komunikasi terkait penyaluran bansos sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen komunikasi yang terintegrasi, transparan, dan bebas dari manipulasi. Model strategi komunikasi penyaluran bansos berfungsi memetakan teori ke situasi nyata, menggambarkan proses komunikasi secara visual, serta membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini, kepada pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya pihak Prodi Ilkom dan FISIP yang senantiasa memberikan dukungan moral kepada tim penulis untuk selalu menghasilkan karya-karya dari hasil penelitian. Tidak lupa, ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada *reviewer*, *editor* dan semua orang yang mengelola jurnal ini sehingga karya tulis ini bisa tampil di jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Nurdin, N., Rusfiana, Y., & Teguh, P. (2025). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(1), 130–145. <https://doi.org/10.22219/journalsospol.v11i1.39660>
- Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. (2022). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia : Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Ali, S., & Leonardi, A. (2022). Peran Humas Pemerintah Desa Lambangsari Dalam Menanamkan Niat Baik (Goodwill) Tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat di Masa Pandemi. *Global Komunika*, 5(1), 41–48.
- Andersen, B., & Fagerhaug, T. (2006). *Root Cause Analysis: Simplified Tools and Techniques* (Paul O'Mara (ed.); 2th ed.). ASQ Quality Press. https://wastonchen.com/wp-content/uploads/2023/02/Root-Cause-Analysis_-Simplified-Tools-and-Techniques-Second-Edition-PDFDrive-.pdf
- Anisti, A., Sidharta, V., Liliyana, L., & Syatir, S. (2022). Peran Komunikasi Pembangunan Dan Sistem Informasi Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 199. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.199-208>
- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394–404.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (edisi revi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial Covid -19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia. *Dialogue*, 3(2), 138–154.
- Cangara, H. (2011). *Pengantar Ilmu komunikasi* (Revisi). Jakarta: Rajawali Press.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Damanik, M., Sumanti, S. T., & Abidin, S. (2022). Strategi Komunikasi Dinas Pemerintah Tinggi Kota Tebing Terhadap Alokasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 2(4). <https://doi.org/10.58432/algebra.v2i4.657>
- Dewi, U.K., Malik, S., Yadita, D., Nugraha, R., Akbar, S.R. Maulana. M.I., Mulyadi. M (2025). Analisis Kasus Korupsi Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19 dari Perspektif Etika dan Profesionalisme Hukum. *Media Hukum Indonesia*. 3(2): 59-67. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15469288>
- DeVito, J.A. (2018). *The Interpersonal Communication Book*. New York: Pearson Education.
- Dwiarto, R. (2023). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi "Cek Bansos. *Prosiding Seminat Nasional UNIMUS*, 6(18), 204–215.
- Fikrillah, H., Nurriqfi, F., Hudawiguna, S., & Juliane, C. (2023). Klasifikasi Penerima Bansos Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 10(1), 683–695.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>
- Gusrienti, N. (2025). Konsep transparansi dan komunikasi yang efektif dalam pencairan dana bantuan sosial umat. *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 180–191.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Halim, W. (2021). Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 18(2), 196–216. <https://doi.org/DOI: 10.19105/nuansa.v18i2.5300>
- Harahap, S. W., Br. Ginting, R. R., Rasyidin, M., & Sahputra, D. (2021). Komunikator dan Komunikan dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 3(1), 106–114. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v3i1.629>
- Hardjana, A. (2000). *Audit komunikasi : teori dan praktek* (J. D. Herfan (ed.)). Jakarta: Grasindo.
- Hariyanto, D. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (1st ed.). Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Hasmawati, F. (2020). Karakteristik Komunikator yang Efektif dalam Komunikasi Antar Pribadi. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan*, 4(2), 69-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jkpi.v4i2.7315>

- Hukum, I. (2025). Modus Baru Penipuan Bansos: Mengaku Petugas Kemensos dan Minta Data Pribadi. *Https://Fahum.Umsu.Ac.Id/*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/modus-baru-penipuan-bansos-mengaku-petugas-kemensos-dan-minta-data-pribadi/>
- Humas. (2023). Bansos Salah Sasaran, Setiap Bulan Negara Merugi Setengah Triliun. *Setda.Tegalkab.Go.Id*. <https://setda.tegalkab.go.id/2023/11/21/bansos-salah-sasaran-setiap-bulan-negara-merugi-setengah-triliun/>
- Hutasoit, Y., Nahor, D. B., Sianturi, E. S., Sati, L., & Theresia, N. (2025). Cendikia pendidikan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Joharsoyo, Y. M. (n.d.). Dirut Bulog Sebut Ada Masalah Data Bansos: Hanya 50 Persen yang Terverifikasi. *Tempo.Co*. 29 Januari 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/dirut-bulog-sebut-ada-masalah-data-bansos-hanya-50-persen-yang-terverifikasi-92623>
- Julianto, B., & Agnanditiya Carnarez, T. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Junanda, Saputra, D., & Harmin. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Bansos di Kota Makassar Berbasis Web. *Journal of Applied Computer Science and Teckhnology (JACOST)*, 1(2), 96–101.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia/Kemensos (2021). *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Sembako*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- Kumalasari, D. S. (2024). Patologi Birokrasi Pelayanan Bansos di Bagian Kesra Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. *Public Service And Governance Journal*, 5(1), 198–213.
- Latif, I. S., & Pangestu, A. I. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107.
- Littlejohn, S.W., & Foss, K.A (2017). *Theories of Human Communication*. Illinois: Waveland Press
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada.
- Masannang, Akbar, & Farid, M. (2023). Strategi Komunikasi Pendamping dalam Implementasi Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Dikecamatan Minasate'ne Pangkep. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7159–7165. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2671>
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa & Jansen, M. (2020). Understanding the Impact of Digital Service Failure on Users: Integrating Tan's Failure and DeLone and McLean's Success Model. *International Journal of Information Management*, 53. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102119>
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Novrizaldi. (2021). Menko PMK Temukan Masalah Penyaluran Bansos di Desa Teluknaga. *Kemenkoppmk*. <https://www.kemenkoppmk.go.id/menko-pmk-temukan-masalah-penyaluran-bansos-di-desa-teluknaga#:~:text=Kata Menko Muhadjir%2C penyebab bansos,serta membagikan masker kepada masyarakat>
- Nurhadi & Kurniawan. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*. 3(1), 90–95. doi: <https://doi.org/10.10358/jk.v3i1.253>
- Oley, J. D. B. (2020.). Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. *Smeru Reseach -nstitute*. 20 Jul9 2020. <https://smeru.or.id/id/article-id/urgensi-untuk-memperbaiki-sistem-bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Ombudsman.go.id. (2024). Problematika Bantuan Sosial dan DTKS. *Ombudsman.Go.Id*. 27/06/2024 . <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dtks>
- Ombudsman Republik Indonesia (2020). *Laporan Khusus: Potensi Maladministrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi*. Jakarta: Keasistenan Utama Substansi VI Ombudsman RI.
- Prasmita & Utama. (2020). Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 9 [4] : 780 - 809.. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/57436>
- Pratama, R. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal Di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. *JPM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 107–118.
- Pratiwi, N. Z. (2023). Strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo. *Lektur Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3). 316-324. DOI: <https://doi.org/10.21831/lektur.v6i3.20967>
- Purnia Rahmatullah, & Rifai. (2019). Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada Dinas Sosial. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(2), 162–170.

- Puspitasari, Pamungkas, & Sapitri. (2022). Sistem informasi pendataan bantuan sosial kabupaten Klaten. *Vocational Education National Seminar*, 1(1), 101–105.
- Putong & Wahyudi (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338-345. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Putri, Slamet & Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2851–2860.
- Rachman, A. (2023). BPK: Penyaluran Bansos Rp 185,23 Miliar Tidak Tepat Sasaran! *CNBC*. 20 Juni 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230620135129-4-447602/bpk-penyaluran-bansos-rp-18523-miliar-tidak-tepat-sasaran>
- Republika. (2021). Ombudsman Temukan Empat Masalah Utama Penyaluran Bansos. *Republika.Co.Id*, 28 Dec 2021,. <https://www.republika.id/posts/23468/ombudsman-temukan-empat-masalah-utama-penyaluran-bansos>
- Rizti, Kusmilawaty & Fahdhila. (2025). Analisis Efektivitas Metode Turun Lapangan dalam Menentukan Penerima Bansos terhadap Distribusi Bansos. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7(3), 506–511. <https://doi.org/10.37034/infec.v7i3.1233>
- Ruhyana & Ferdiansyah. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid -19. *Khazanah Intelektual* 4(2), 789–804.
- Salsabila, Retpitasari, Faqih, & Prasetyo. (2024). Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 31–44.
- Salsabila, Muna, Pradana, & Nurcahya (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Seiler, W. J., & Beall, M. L. (2011). *Communication: Making Connections* (8th ed.). Allyn & Bacon/Pearson.
- Sembiring, Fauzi, Khalifah Khotimah, & Rubiati. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Covid 19 menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus : Desa Sundawenang). *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 11(2), 97-101. <https://doi.org/10.36448/jsit.v11i2.1563>
- Septo, P. (2025). KPK Periksa Rudy Tanoe Sebagai Tersangka Perkara Bansos Beras. *Berita Nasional*. Com. 28 November 2025 . <https://beritanasional.com/detail/122141/kpk-periksa-rudy-tanoe-sebagai-tersangka-perkara-bansos-beras>
- Simorangkir, H. (2025). Puluhan Warga Kabupaten Tangerang Dicoret dari Bansos Negara Judol. *Metrotvnews.Com*. 6 October 2025 . <https://www.metrotvnews.com/read/N9nC2VAj-puluhan-warga-kabupaten-tangerang-dicoret-dari-bansos-negara-judol>
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumirat & Suryana. (2017). *Komunikasi Persuasif*. Pondok Cabe: Universitas Terbuka.
- Suprpto, Edora & Pasaribu. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Program Bantuan Sosial (BANSOS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(January), 188–197. DOI: <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1057>
- Syahadat, Arief, & Efrianto (2024). Politik Pork Barrel: Bantuan Sosial (Bansos) Jokowi Menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Journal Publicuho*, 7(4), 2340–2350. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.621>
- Tafanao & Ratnawat. (2025). Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Cek Bansos pada Google Play Store Menggunakan Metode Support Vector Machine. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(3), 1022–1032. <https://doi.org/http://doi.org/10.33395/remik.v9i3.15124>
- Trianto (2025). Usul-Sanggah Bansos Kini Bisa Lewat Command Center 171. *Rakyat Merdeka Olnine*. 12 November 2025. <https://rmol.id/politik/read/2025/11/12/686574/usul-sanggah-bansos-kini-bisa-lewat-command-center-171>
- Triyono & Kartika. (2022). Paspur Sosial: Strategi Optimalisasi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Logistik Kebencanaan Melalui The House Model. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(12), 3251–3266.
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Info Singkat*. Dpr.Go.Id. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-218.pdf
- Wibowo, R. A. (2024). Politisasi Birokrasi - Bantuan Sosial dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Sengketa Pemilu. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi Dan Gagasan Ke Depan*, 79–97.
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan. *E-Jurnal IAIN Samarinda (Institut Agama Islam Negeri)*, XVIII (No.1, Juni 2025), 53–61. DOI: <https://doi.org/10.21093/lj.v17i1.428>
- Wirmanda, A., Premananto, G., & Muhtadi, R. (2019). Model Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah Pada Jaminan Sosial. *'Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 53–77.